

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis atas kerja-kerja antikorupsi yang dikembangkan Madrasah Antikorupsi dalam tiga tahun. Dapat disimpulkan bahwa, Madrasah Antikorupsi sebagai gerakan sosial antikorupsi dengan merekonstruksi gerakan anti korupsi terdahulu yang telah di laksanakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keberadaannya tumbuh dari tradisi kritis di kalangan pemuda atas kejahatan tindak pidana luar biasa, korupsi. Hal bisa terpahami dari tujuan gerakan yang telah dilakukan. Madrasah Antikorupsi dibentuk melalui tujuan yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas aktivis Pemuda Muhammadiyah dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Sebuah kesadaran yang tumbuh sebagai respon atas maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Lahirnya Madrasah Antikorupsi muncul dari unsur masyarakat madani adalah satu ciri dari pengertian gerakan sosial.

Demokrasi yang memungkinkan adanya kebebasan berserikat dan bersuara telah melahirkan banyak bentuk gerakan sosial. Ciri dari gerakan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat madani/sipil secara berkelanjutan. Karakteristik gerakan sosial yang dapat dilihat dari posisi Madrasah Antikorupsi adalah pola kerjanya yang dikembangkan dengan cara kekuatan jaringan di sejumlah Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah di Indonesia. Dinamikanya berkembang dalam dua aspek populis dan ideologis. Aspek populis

dapat dipahami sebagai sarana ideologisasi. Sedangkan aspek ideologis adalah penguatan wawasan mendalam tentang pengertian-pengertian korupsi yang menggunakan sarana pelatihan dan sekolah.

Ukuran capaian kerja Madrasah Antikorupsi bisa dilihat dari tumbuhnya kepercayaan lembaga negara antikorupsi untuk menjalin kerjasama. Di lain pihak, ukurannya dapat dilihat pada aspek keterlibatan masyarakat dalam kerja- kerja kampanye dan edukasi antikorupsi. Dari capaian tersebut kita bisa memahami bagaimana pola kerja yang dikembangkan Madrasah Antikorupsi. Pola kerja yang dikembangkan Madrasah Antikorupsi, pertama, mengolah kekuatan jaringan pada semua unsur, baik dari unsur intern di Pemuda Muhammadiyah, lembaga negara antikorupsi, dan serta elemen pemuda seperti komunitas band, lembaga pendidikan dan masyarakat umum. Jaringan itu mampu dirajut dalam satu wacana yang menjadi tujuan dari Madrasah Antikorupsi.

Dari hasil temuan peneliti, yang pertama menyimpulkan bahwa Madrasah Antikorupsi mempunyai 4 (empat) peran dalam pengarusutamaan gerakan antikorupsi di Indonesia tahun 2015-2017, yaitu (1) pendidikan antikorupsi, (2) ruang diskusi antikorupsi, (3) advokasi antikorupsi (4) pengawasan antikorupsi. Yang kedua, Madrasah Anti Korupsi telah melanjutkan gerakan terdahulu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan cara memanfaatkan teknologi dan informasi media sosial sebagai wadah untuk melaksanakan perannya sebagai advokasi antikorupsi. Berdasarkan dari hasil temuan-temuan pemaparan di atas, maka dapat di analisis bahwa, Madrasah Antikorupsi telah berperan dalam upaya pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan kreatif.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Madrasah Antikorupsi untuk selalu konsisten dalam upaya pencegahan korupsi. Selain melakukan pendidikan dan sosialisasi anti korupsi, Madrasah Antikorupsi harus menekankan kepada pengawasan kepada pemerintah supaya proses pencegahan bisa lebih optimal. Ke depan Madrasah Antikorupsi juga harus melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik dalam internal Madrasah Antikorupsi. Seperti meningkatkan komitmen anggota dalam berjamaah lawan korupsi dan meningkatkan pemahaman korupsi dengan berbagai pelatihan, semakin banyak pelatihan maka anggota dan santri makin tertarik untuk ikut dan dampaknya untuk meningkatkan pemahaman anggota dan santri terkait permasalahan korupsi. Selain itu Madrasah Antikorupsi juga untuk melakukan gerakan yang lebih masif mengingat permasalahan korupsi di Indonesia yang sudah cukup rumit supaya gerakan yang dilakukan bisa semakin optimal dan tepat sasaran, yaitu terbebasnya Indonesia dari korupsi.

2. Kepada Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di sarankan agar terus membuat inoasi terkait pendidikan antikorupsi dan menjalin kerjasama dengan kampus untuk memasukkan kurikulum antikorupsi di sekolah dan kampus, Karena pendidikan antikorupsi adalah modal utama bagi gerakan anti korupsi untuk terus mempunyai SDM yang berkualitas dalam rangka pencegahan antikorupsi.